

Analysis of Implementation of the Health Operational Assistance Budget (Bok) in the Era of the Covid-19 Pandemic at the Public Health Office of Bali Province in 2020

Analisis Implementasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) di Era Pandemi Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2020

Anak Agung Istri Mas¹, I Putu Dedy Kastama Hardy^{2*}, Made Agus Sugianto³

^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: hardy@undhirabali.ac.id

Article info

Keywords:

Health Operational Assistance

Abstract

Health Operational Assistance (BOK) is a fund used to ease the public's burden of financing the health sector, particularly services at Community Health Centers, reducing maternal mortality, infant mortality, and malnutrition. This research is a descriptive study with a qualitative approach, the number of informants in this study was seven (7) people, and the informants were selected based on the principles of adequacy and suitability. The triangulation method used in this study consisted of source triangulation, namely the researcher obtained data from different informants in exploring the same topic, and data triangulation, namely researchers using observation methods, documentation studies, and in-depth interviews. The results showed that the low absorption of Health Operational Assistance funds was due to the delay in the technical guidance (JUKNIS) of the Health Operational Assistance (BOK), causing the withdrawal of all activities that used BOK funds. Suggestions that can be given are to coordinate with the BOK manager at the Ministry of Health so that the issuance of Technical Instructions (Juknis) is accelerated so that the planning process at the Bali Provincial Health Office can be carried out earlier and the program manager should first prepare a plan of activities that will be carried out before the technical guidelines come down so that program managers can immediately start activities when technical guidelines have been issued.

Kata kunci:

Bantuan Operasional Kesehatan

Abstrak

Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jumlah informan penelitian ini adalah tujuh (7) orang, informan dipilih berdasarkan asas kecukupan dan kesesuaian. Adapun metode triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber yaitu peneliti mendapatkan data dari informan yang berbeda dalam menggali topik yang sama dan triangulasi data yaitu peneliti menggunakan metode observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya serapan dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah dikarenakan adanya keterlambatan turunnya petunjuk teknis (JUKNIS) BOK sehingga menyebabkan mundurnya seluruh kegiatan yang menggunakan dana BOK. Saran yang dapat diberikan adalah Berkoordinasi dengan pengelola BOK di Kementerian Kesehatan agar penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) di percepat sehingga proses perencanaan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali bisa dilaksanakan lebih awal dan sebaiknya pengelola program terlebih dahulu mempersiapkan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum juknis turun sehingga pengelola program dapat langsung berkegiatan saat juknis telah turun.

PENDAHULUAN

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan maksud untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Sumber data yang digunakan pada penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari hasil pengisian kuesioner dan hasil wawancara responden atau subjek penelitian yaitu kepala seksi dari pengelola program BOK Provinsi

di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Subkoordinator Unit Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sumber data sekunder diperoleh dari data mengenai laporan realisasi pelaksanaan BOK Provinsi, Petunjuk teknis pengelolaan DAK Nonfisik, dokumen pelaksanaan anggaran BOK Provinsi. Informan pada penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*. Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti dengan instrumen penunjang pedoman wawancara dan alat perekam. Data kualitatif pada penelitian ini dilakukan secara tematik. Adapun metode triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber yaitu peneliti mendapatkan data dari informan yang berbeda dalam menggali topik yang sama dan triangulasi data yaitu peneliti menggunakan metode observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di Provinsi Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali beralamat di jalan Melati No.20, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

Riwayat Penelitian

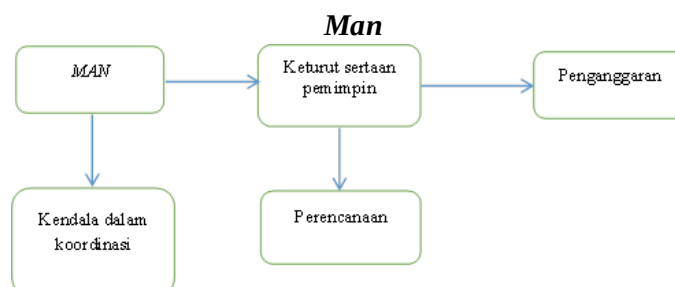
Kegiatan pengumpulan data dimulai pada bulan Mei 2022 dan berlangsung selama 1 bulan setelah melalui beberapa proses untuk mengurus surat ijin penelitian. Pengumpulan data penelitian berlangsung dengan melakukan study dokumentasi dan wawancara mendalam.

Karakteristik Informan

Informan wawancara mendalam pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.

Gambaran Implementasi BOK dari sisi Input

Hasil dari penelitian diperoleh dari hasil *study* dokumentasi dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara. Ketersediaan input yang diteliti meliputi ketersediaan SDM (*man*), dana (*money*), pedoman (*methode*), sarana dan prasarana (*material&machine*).



Gambar 1 Keterlibatan Pimpinan
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 1 di atas bahwa, Kepala Dinas memberikan arahan kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terkait kegiatan yang bisa dianggarkan pada dana BOK berdasarkan draf JUKNIS yang telah tersedia. Setelah itu Sekretaris dan Kepala Bidang berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Seksi Terkait perencanaan kegiatan apa saja yang akan diusulkan untuk mendapatkan dana BOK tersebut. Sedangkan dari sisi koordinasi, tidak ada kendala dalam berkoordinasi.

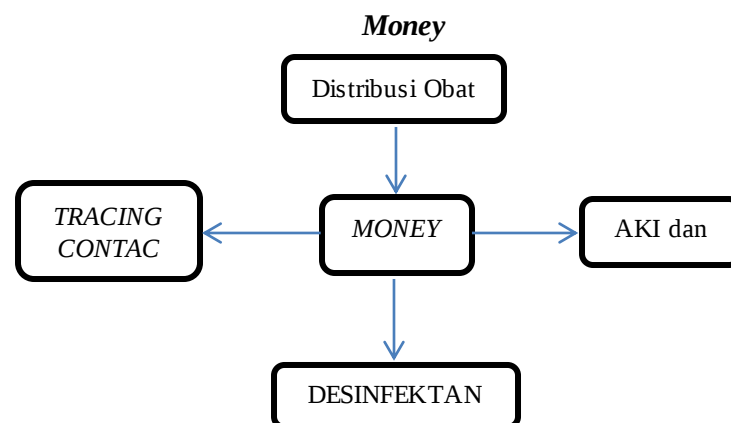
Keterlibatan Pimpinan dalam proses perencanaan dan penganggaran dana BOK Provinsi di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagaimana dijelaskan oleh responden sebagai berikut:

“pimpinan memfasilitasi dan menentukan kegiatan yang menjadi prioritas yang akan diusulkan dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya” (Informan 1).

“Pimpinan memberikan arahan terkait kegiatan yang harus dianggarkan sesuai Juknis” (Informan 2).

Selain itu mengenai kendala dalam melakukan koordinasi dari tingkat pucuk pimpinan, bagian perencanaan dan pengelola BOK Provinsi dimasing-masing bidang, seperti yang tertuang dalam wawancara mendalam, dari 7 informan semua informan menyatakan tidak ada kendala seperti yang tertuang di bawah ini.

“Tidak ada kendala dalam melakukan koordinasi. Karena lebih baik bertanya langsung ke bagian perencanaan” (Informan 4).



Gambar 2 Dukungan Dana BOK di Era Pandemi Covid-19
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 2 di atas bahwa dari sisi input Money, mengenai bagaimana dukungan anggaran BOK Provinsi dalam pandemi Covid-19. Pemerintah pusat memberikan dukungan dana pada saat terjadi pandemi covid-19. Dana Bok tersebut digunakan untuk Tracing Contac, Desinfektan, pelacakan angka kematian ibu dan angka kematian Bayi dan distribusi obat. Total pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 5,905.278.000,00 dengan rincian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendapat dana BOK sebesar Rp. 1.111.079.000,00 dimana pagu BOK tersebut kegiatannya dikerjakan oleh tiga seksi secara bersama-sama. Bidang Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari tiga seksi, masing-masing mendapatkan dana BOK dengan rincian Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mendapat dana BOK sebesar Rp.1.097.777.300,00. Seksi Promosi Kesehatan mendapat dana BOK sebesar Rp. 1.787.129.000 dan Seksi Kesehatan Lingkungan mendapatkan dana BOK sebesar Rp.

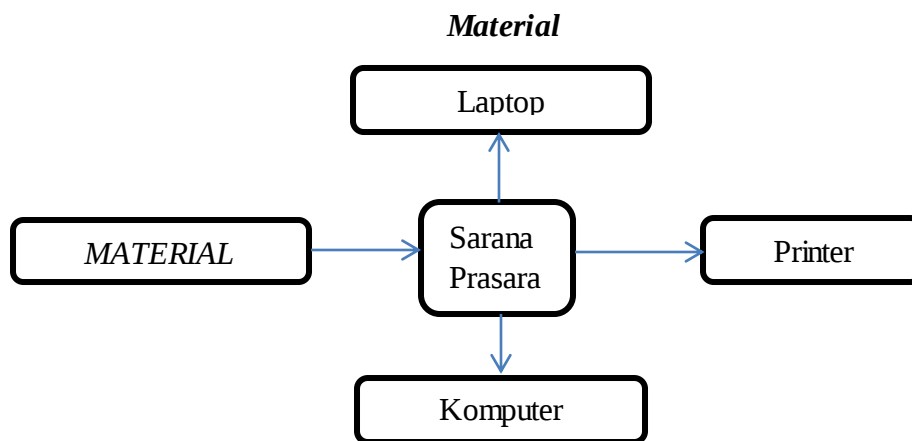
262.865.000,00. Pada Sekretariat, Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mendapatkan dana BOK sebesar Rp. 682.352.700,00. Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Seksi farmasi mendapatkan dana BOK sebesar Rp. 67.375.000,00,

Hal tersebut juga ditegaskan dari hasil wawancara mendalam terhadap informan seperti yang tertuang di bawah ini.

“Dana BOK digunakan dalam mendukung kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak termasuk pelacakan kasus kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh Covid-19” (Informan 1).

“Sangat membantu, karena semua sumber anggaran baik dari APBN maupun APBD difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19” (Informan 4).

” Dana BOK ini sangat membantu proses pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19. Namun keterlambatan turunnya juknis yang menyebabkan tidak banyak kegiatan BOK yang bisa dilaksanakan ” (Informan 5).



Gambar 3 Sarana dan Prasarana Pendukung
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 3 di atas, bahwa dari sisi input Material, mengenai sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan BOK Provinsi di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat sarana prasarana seperti komputer, laptop dan printer yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pelaksanaan program yang didanai dengan dana BOK

Hal tersebut juga ditegaskan berdasarkan hasil wawancara mendalam pada 7 informan, semua informan mengatakan adanya sarana prasarana seperti yang tertuang di bawah ini.

“ada sarana prasarana yang menunjang kegiatan BOK ini yaitu berupa komputer, laptop dan printer” (Informan 7).

Machine



Gambar 4 Aplikasi Penunjang
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Bahwa dari sisi input Machine, terkait aplikasi yang disiapkan untuk menunjang proses penyelenggaraan BOK Provinsi dari sisi perencanaan dan pelaporan, terdapat aplikasi yang bernama e-renggar. Pada aplikasi inilah informan melakukan penginputan data perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi.

Ketersediaan aplikasi e-renggar ini juga di disampaikan dalam wawancara mendalam oleh 7 informan penelitian.

“ada aplikasi yang di gunakan yaitu aplikasi e-renggar. Dimana masing-masing seksi membuat usulan mereka lalu menyerahkan pada kami, laporan tersebut kami rekap lalu kami input pada aplikasi e-renggar. Begitu pula pelaporan BOK, setiap seksi atau bidang membuat laporan realisasi kegiatan mereka lalu laporan tersebut kami rekap dan kami input pada aplikasi e-renggar” (Informan 5)

Method



Gambar 5 Pedoman Penyelenggaraan BOK Provinsi
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 5 di atas bahwa dari sisi input method, terkait ketersediaan pedoman penyelenggaraan BOK provinsi. terdapat petunjuk teknis (juknis) dimana juknis ini digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi kegiatan dengan menggunakan dana BOK tersebut.

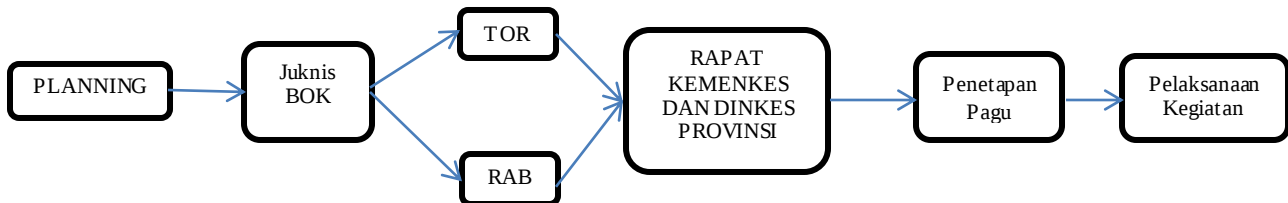
Ketersediaan juknis ini juga di disampaikan dalam wawancara mendalam sebagaimana dijelaskan oleh responden sebagai berikut:

“Ada pedoman pelaksanaan berupa JUKNIS BOK. Dimana sebelum JUKNIS ini turun, draf juknis sebelumnya sudah di sosialisasikan sebagai pedoman pembuatan perencanaan BOK.” (Informan 5).

Gambaran Implementasi BOK dari sisi Proses

Hasil dari penelitian diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara. Ketersediaan proses yang diteliti meliputi *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

Planning



Gambar 6 Proses Perencanaan BOK
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 6 di atas bahwa dari sisi planning terkait proses perencanaan BOK Provinsi di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Proses perencanaan diawali dari turunnya draf juknis, lalu usulan dari masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan kegiatan di daerah yang dituangkan dalam TOR dan RAB, pengusulan melalui sistem e-renggar kemenkes RI selanjutnya pelaksanaan rapat koordinasi teknis DAK antara kemenkes dengan daerah menyelaraskan antara usulan provinsi dengan program prioritas pusat serta ketentuan yg terkait dengan DAK Nonfisik. Tahap akhir penetapan pagu alokasi dengan menyesuaikan kegiatan sesuai draft juknis yg telah disosialisasikan.

Hal tersebut juga ditegaskan berdasarkan hasil wawancara mendalam sebagaimana dijelaskan oleh responden sebagai berikut :

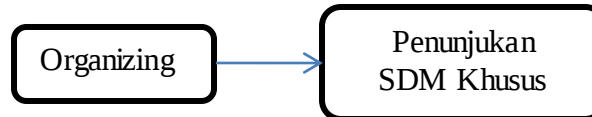
“Perencanaan BOK mengacu pada juknis, dituangkan dalam TOR dan RAB. jumlah anggaran yang diterima oleh sub kegiatan KIA dan Gizi diajukan sesuai dengan kebutuhan program untuk selanjutnya dilakukan desk dan verifikasi oleh eslon 2 pengampu kegiatan, dan pusat. Rincian anggaran dan kegiatan yang telah distujui selanjutnya diinput dalam aplikasi e-renggar” (Informan 1).

“Perencanaan BOK mengacu pada draf juknis, dituangkan dalam TOR dan RAB. jumlah anggaran yang diterima sesuai dengan kebutuhan program untuk selanjutnya dilakukan desk dan verifikasi oleh eslon 1 pengampu kegiatan, dan pusat. Rincian anggaran dan kegiatan yang telah distujui selanjutnya diinput dalam aplikasi e-renggar oleh seksi Sunprog” (Informan 3)

“Proses perencanaan diawali usulan dari masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan kegiatan di daerah, pengusulan melalui sistem e-renggar kemenkes RI selanjutnya pelaksanaan rapat koordinasi teknis DAK antara kemenkes dengan daerah menyelaraskan antara usulan provinsi dengan program prioritas pusat serta ketentuan yg terkait dengan DAK Nonfisik. Tahap akhir penetapan pagu alokasi dengan menyesuaikan kegiatan sesuai draft juknis yg telah disosialisasikan” (Informan 5).

“Pagu anggaran total dan draf juknis BOK Provinsi sudah ditentukan oleh Pusat. Permenkes sudah mengatur rincian menu kegiatan dan jenis belanja apa saja yang bisa realisasi. Berpedoman pada hal tersebut, pengelola BOK provinsi menyusun RAB kegiatan dikoordinasikan dengan seksi suneva dan semua pengelola BOK. Proses verifikasi/desk untuk persetujuan perencanaan anggaran dilakukan oleh pusat dan di upload hasilnya pada aplikasi e-renggar” (Informan 6)

Organizing



Gambar 7 Ketersediaan SDM

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 7 di atas bahwa dari sisi organizing, terdapat penunjukan staf khusus yang bertugas dalam mengelola dana BOK ini dimana dimulai dari Kepala Dinas yang berkoordinasi pada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang lalu dilanjutkan koordinasi antara Sekretaris Dinas dengan Kasubag dibawahnya dan Kepala Bidang dengan Kepala Seksi yang ada dibawahnya. Lalu Kasubag dan Kepala Seksi menunjuk staf yang bertugas dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan BOK tersebut dilaksanakan oleh masing-masing staf pemegang program di bidang tersebut.

Pada hasil wawancara mendalam terhadap ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut juga ditegaskan berdasarkan hasil wawancara mendalam pada informan seperti yang tertuang dalam wawancara dibawah ini.

“Dalam sub kegiatan KIA dan gizi ditunjuk satu orang staf yang bertugas dalam penginputan RAB kedalam sistem aplikasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan” (Informan 1)

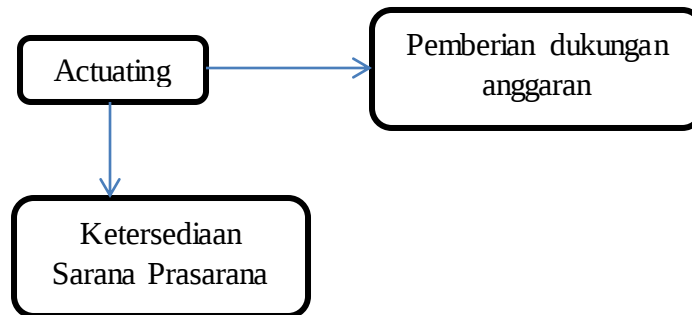
“BOK Provinsi dikoordinir oleh suneva. Untuk penyusunan RAB sesuai juknis permenkes dilakukan oleh masing-masing seksi yang terkait. Setelah terekap, dilakukan verifikasi/desk oleh pusat dengan dihadiri masing-masing pengelola BOK di tiap seksi terkait dan suneva. Pengelola BOK di tiap seksi sama dengan pengelola dana APBD karena mekanisme dana BOK mengikuti mekanisme APBD” (informan 6).

“Dalam sub kegiatan kesehatan lingkungan ditunjuk satu orang staf yang bertugas dalam penginputan RAB kedalam sistem aplikasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan” (Informan 3).

“Ya ada, dengan ikut berperan aktif dari menyusun RAB, TOR, sampai realisasi anggaran BOK yg telah kami usulkan” (Informan 4).

“Ada, staf yang ditunjuk dalam menyusun RAB, TOR dan pelaporan realisasi” (Informan 2)

Actuating



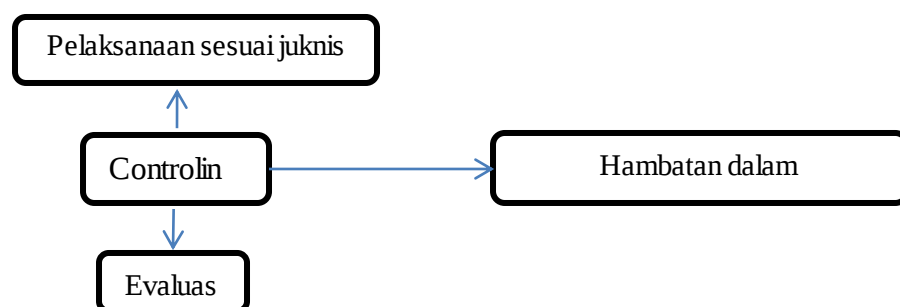
Gambar 8 Kendala Dalam Proses Pendanaan BOK
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan gambar 8 di atas bahwa dari sisi actuating dalam proses kegiatan BOK, terdapat sarana dan prasarana dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi yaitu berupa Laptop, Komputer dan printer. Dimana dalam prosesnya tidak ada kendala terkait sarana prasarana tersebut. Dari segi pemberian dukungan anggaran pun tidak ada kendala.

Pada hasil wawancara mendalam mengenai kendala dalam pemberian dukungan anggaran BOK Provinsi, 7 informan mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pemberian dukungan anggaran BOK Provinsi. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana mempengaruhi dukungan anggaran BOK Provinsi, 7 informan mengatakan tidak ada kendala.

"Tidak ada kendala pada sarana dan prasarana" (Informan 5).

Controlling



Gambar 9 Evaluasi Kegiatan
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2022)

Dari sisi *controlling* seluruh kegiatan BOK mulai dari perencanaan. Pelaksanaan dan Pelaporan sudah sesuai dengan JUKNIS BOK. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga menyebabkan realisasi fisik dan keuangan menjadi rendah. Terkait evaluasi, terdapat pelaksanaan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 bulan, dimana tidak ada kendala dalam prosesnya.

Terkait kendala atau hambatan dalam implementasi BOK Provinsi, informan mengatakan bahwa kegiatan yang awalnya diperuntukan untuk mendukung kegiatan program dimasing-masing seksi, oleh karena terjadi pandemi di bulan maret, maka seluruh kegiatan dihentikan dan adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) yang diberlakukan pemerintah. Selain itu karena kegiatan BOK yang awalnya direncanakan untuk MONEV ke kabupaten dan kota dalam rangka mendukung kegiatan di masing-masing bidang serta kegiatan pertemuan/pelatihan yang sedianya akan mengumpulkan banyak masa, oleh karena kebijakan WFH dan larangan mengumpulkan masa ini lah yang menyebabkan seluruh kegiatan yang menggunakan dana BOK tersebut dihentikan. Bahwa adanya informasi melalui pesan Whatsapp dari Kementrian Kesehatan bahwa dana BOK ini akan digeser untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali menunggu terbitnya Juknis yang mengatur seluruh kegiatan yang diperuntukan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Namun dalam prosesnya Juknis turunnya cukup lama yaitu dibulan juli sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan karena terbentur waktu. Hal tersebut juga ditegaskan berdasarkan hasil wawancara mendalam pada informan seperti yang tertuang dalam wawancara dibawah ini.

“Adanya beberapa kali reconfussing pada anggaran BOK dan system kerja WFH sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan program secara tatap muka/offline. Dana BOK saat pandemi di gunakan untuk monev kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terkait kasus meninggalnya ibu dan bayi yang terpapar covid-19” (Informan 1)

“Dana yang sedianya akan digunakan untuk rapat-rapat, rakor, pertemuan, perkemahan, monev dan publikasi KIE diberbagai media harus dihentikan karena adanya intruksi WFH dan larangan untuk mengumpulkan banyak masa. Kegiatan yang dapat di realisasikan adalah publikasi KIE untuk menyebar luaskan informasi terkait Covid-19 melalui media cetak seperti stiker, tanding banner, baliho, spanduk, car brending. Media elektronik seperti media social (facebook dan instagram), spot radio, penayangan videotron. Hal tersebutlah yang menyebabkan realisasi keuangan menjadi rendah” (Informan 2).

“Dana akan digunakan untuk menunjang kegiatan di seksi harus di hentikan karena adanya instruksi WFH dan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan program. Kegiatan yang dapat dilaksanakan hanyalah proses pencegahan penularan covid-19 dengan cara desinfektan. Sehingga tidak banyak dana BOK yang bisa di serap pada tahun 2020” (Informan 3).

“Dana BOK 2020 awalnya akan digunakan untuk kegiatan monitoring evaluasi, pertemuan dan perjalanan dinas. Namun karena pandemi, adanya kebijakan work from home (WFH) dan larangan untuk mengumpulkan massa maka seluruh kegiatan sementara di hentikan sambil menunggu intruksi lebih lanjut dan turunnya juknis BOK. Lalu setelah juknis turun, kegiatan yang bisa dilakukan adalah monitoring evaluasi yang menunjang kegiatan pencegahan dan penangulangan covid-19 seperti tracing contac pada masyarakat yang di curigai terpapar virus covid-19” (Informan 4).

” Kendala yang dihadapi adalah berhentinya banyak kegiatan rutin dan diberlakukan kebijakan WFH sehingga realisasi dana BOK menjadi rendah. Selain itu keterlambatan turunnya juknis yang mengatur kegiatan yang bisa dilaksanakan saat pandemi membuat tidak banyak kegiatan yang bisa direalisasikan pada tahun 2020” (Informan 5).

“Dana BOK pada seksi farmasi rencana awalnya akan digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas untuk distribusi obat dan pengemasan obat. Oleh karena pandemi yang terjadi di awal tahun 2020, terjadi keterlambatan turunnya juknis BOK sehingga pemegang program tidak berani berkegiatan. Hal ini karena pemegang program tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana BOK. Solusinya adalah pihak kabupaten/kota yang memerlukan obat yang datang sendiri ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk mengambil obat-obatan yang diperlukan, namun kami tidak mengetahui dana apa yang kabupaten/kota gunakan untuk kegiatan distribusi obat tersebut. Di pertengahan tahun barulah juknis BOK turun sehingga kami baru bisa berkegiatan, saat itu dikarenakan waktu yang mendekati akhir tahun dan sudah ada beberapa obat-obatan yang di ambil secara mandiri oleh kabupaten/kota, maka hanya sedikit kegiatan realisasi yang bisa kami kerjakan. Itulah yang menyebabkan realisasi BOK kami rendah pada tahun 2020” (Informan 6).

“Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan WFH sehingga banyak kegiatan harus dihentikan sementara sambil menunggu turunnya JUKNIS. Kendala berikutnya adalah terjadi keterlambatan turunnya juknis sehingga tidak banyak kegiatan yg dapat dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut”. (informan 7).

SIMPULAN

1. Input 5 M (man, money, method, material, machine)
 - a. Pimpinan turut serta dalam perencanaan dan penganggaran BOK Provinsi di Dinas Kesehatan Provinsi Bali seperti tertuang dalam berita acara rencana kegiatan yang merupakan hasil desk bersama Kementerian Kesehatan pada saat penyusunan awal rencana kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam hal ini adalah BOK Provinsi.
 - b. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana BOK pada saat terjadi pandemi covid-19. Total pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 5,905.278.000,00
 - c. Dalam menunjang kegiatan yang di danai oleh Dana BOK, terdapat sarana prasarana yang cukup memadai yaitu Laptop, Komputer dan *Printer*.
 - d. Terkait aplikasi yang disiapkan untuk menunjang proses penyelenggaraan BOK Provinsi, terdapat aplikasi yang bernama e-renggar.
 - e. Bahwa terdapat petunjuk teknis (juknis) yang mengatur seluruh kegiatan dalam pendanaan BOK. Juknis ini mengatur kegiatan BOK sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.
2. Proses POAC (planning, Organizing, actuating, controlling)
 - a. Pada proses perencanaan terdapat berita acara RKA DAK Non Fisik BOK Kesehatan dimana berita acara yang telah disahkan ini akan di input di aplikasi e-renggar sebagai tahap akhir dari proses perencanaan.
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan yang didanai BOK SDM yang melaksanakan adalah staf pemegang program kegiatan tersebut, sedangkan dalam proses perencanaan dan pelaporan ditunjuk satu orang staf seksi untuk mengkoordinir seluruh perencanaan dan pelaporan BOK di seksinya.

- c. Tidak ada kendala dalam pemberian dukungan anggaran BOK Provinsi. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana tidak ada kendala yang mempengaruhi dukungan anggaran BOK Provinsi.
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh BOK ini sudah sesuai dengan pedoman yang terdapat pada juknis dan laporan realisasinya pun sudah di input pada aplikasi e-renggar. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan dan fisik seperti keterlambatan dalam turunnya juknis yang mengatur seluruh kegiatan dalam pendanaan BOK. Kendala lainnya adalah adanya kebijakan work from home (WFH) dan larangan mengumpulkan massa yang menyebabkan banyaknya kegiatan monev, pertemuan dan perjadin yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu proses distribusi obat yang terkendala terlambatnya turunnya juknis sehingga sehingga kabupaten/kota yang datang langsung ke Dinas Provinsi Bali menyebabkan rendahnya realisasi di bidang farmasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Dhyana Pura, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah mendukung kami dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: *Alfabeta*
- Bastian, Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: *Salemba Empat*
- Maria.S.W.(1996). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar. Jakarta: *Gramedia Pustaka Utama*
- Notoadmojo, S. (2011). Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan seni. Jakarta: *Rineka Cipta*.
- Setyaji Jarot, dkk. (2010). Buku pintar menguasai komputer dan laptop: dilengkapi pembahasan internet. Jakarta: *Mediakita*.
- Saryono (2011). Metode Penelitian Kesehatan: Penuntun Praktis Bagi Pemula. Jakarta: *Alfabeta*.
- Kemenkes RI.(1992).*Undang-undang nomor 23 tahun 1992*. Jakarta:Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2004). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2019).*PMK RI No. 86 Tahun 2019 Tentang JUKNIS Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Farida, dkk. (2020). *Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kranji Kota Bekasi Tahun 2020*.
- Herlina. (2020). *Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kabupaten Konawe Tahun 2020*.
- Desy. (2017). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Peningkatan Efektivitas Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017*.
- Hermawan. (2020). *Implementasi Refocussing dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Penanganan Covid-19 Di Dinas*

- Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.*
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method) Tahun 2014.*
- Wirjono, Endang Raino & Raharjono. (2007). *Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Manajerial.* KINERJA, 11.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga
- Indonesia, (2020). <https://covid19.go.id/artikel/2020/04/06/apa-yang-dimaksud-dengan-pandemi> diakses pada tanggal 16 Maret 2021.
- Satrianegara, M. Fais. (2009). *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan.* Jakarta:Salemba Medika, *Dasar Dasar Manajemen, Oleh Yayasan Trisakti*
- Dakhi Yohannes. (2016). *Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu.* Jurnal Warta, Edisi:50
- Harrington, H. J. (2009). *The Six Sigma Green Belt Handbook.* California: Paton Professional.
- Baharudin, (2012). *Kepemimpinan Pendidikan Islam.*Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Rusdianto, Ujang. (2013). *CSR Communication a Framework for PR Practitioners.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu S.P, (2006), *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara : Jakarta.*
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Edisi 2.* BPFE. Yogyakarta.
- Cahyo Adi Prasetyo., dkk. (2021). *Pengaruh Harga dan Online Consumer Review Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pelanggan Shopee di Bandung tahun 2020).* Vol. 58, No. 3.
- WHO. World Health Statistics (2015): World Health Organization; 2015.
- Irianto, K. (2007). *Panduan Gizi Lengkap: Keluarga dan Olahragawan.* Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *INFODATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Situasi Balita Pendek.* Jakarta Selatan.
- Luthan, P.L.A dan Syafriandi. (2005). *Aplikasi Microsoft Project Untuk Penjadwalan Kerja Proyek Teknik Sipil.* Andi offset, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Basyiruddin Usman. (2002). *Media Pendidikan.* Jakarta: Ciputat Press.

